PENGARUH RETRIBUSI DAERAH DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL
(Survei Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2012-2015)

Oleh :
HELMI GHARNA RAMADHAN
21112265
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia
Email: helmigharna94@gmail.com

ABSTRACT

Capital Expenditure is influenced by several factors, such as the Local Retribution and Special Allocation Fund. There is a phenomenon in 2014 and 2013 which showed that the variables Local Retribution increased but not followed by Capital Expenditure, as well as variable Special Allocation Fund increased but not followed by the Capital Expenditures. This study aims to determine how much influence the Local Retribution and Special Allocation Fund to the Capital Expenditure in the District and City in the province of West Java.

The method used in this research is descriptive method, verification with quantitative approach. The method used is multiple linear analysis method. Before done also test classic assumptions, including normality test, multicolinearity, heteroscedasticity test and autocorrelation test processed with SPSS 21.0 software.

The results showed that there was no violation of normal indicating that the data has been able to use multiple linear analysis method. The results of this study indicate that the Local Retribution and Special Allocation Fund effect on Capital Expenditure.

Keyword: Local Retribution, Special Allocation Fund, Capital Expenditure.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Era desentralisasi dan otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh, serta tantangan untuk dapat menggali potensi daerah yang dimiliki guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai dasar modal pembiayaan dan penyelenggaran pemerintah di daerah. Esensi kebijakan ekonomi daerah yang bergulir saat ini telah menempatkan kabupaten dan kota sebagai titik berat ekonomi, nampaknya hal tersebut telah membawa perubahan dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah. Hal ini baik untuk perkembangan pembangunan di Indonesia, yang tentunya juga dapat berpengaruh pada peningkatan pelayanan, perbaikan, kesejahteraan dan jaminan hidup bagi masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Pemerintah Daerah harus menyusun anggaran yang baik agar kemudian dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitas yang akan dilaksanakan. Anggaran pemerintah adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu. Anggaran dalam Pemerintah Daerah atau biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah (Tanjung, 2007).

Aspek penting dalam konteks otonomi daerah ialah sistem pembiayaan daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas daerah tersebut adalah dengan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Halim dan Kusufi, 2012:107). Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Felix (2012) menilai, alokasi belanja modal seharusnya lebih diutamakan

daripada belanja lain yang tidak produktif, karena belanja modal merupakan komponen penting dalam pembangunan daerah dan pelayanan publik.Oleh karena itu Pemerintah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Kawader, 2008).

Menurut Suparmoko (2002:55) pajak daerah merupakan bagian pendapatan asli daerah yang terbesar, kemudian diikuti dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Untuk daerah dengan kondisi perekenomian yang memadai, akan dapat diperoleh pajak yang cukup besar. Tetapi untuk daerah yang masih tertinggal, Pemerintah Daerah hanya akan memperoleh pungutan pajak yang terbatas. Meski begitu, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.34 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Era desentralisasi fiskal inipun diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu akan terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda (Harianto dan Adi, 2007). Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pangalokasian belanja modal, seperti pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No.33 Pasal 1 angka 23 Tahun 2004). Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena Dana Alokasi Khusus (DAK) cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Kenaikan pajak daerah tidak memberikan dampak terhadap pembangunan fisik.
2. Masih rendahnya infrastruktur daerah.
3. Realisasi belanja modal Pemprov Jabar dinilai masih sangat kecil.

1.3 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat.
2. Seberapa besar pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian dimaksudkan untuk mencari kebenaran atas pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap
Belanja Modal dengan menggunakan data yang diperoleh dan uji empiris, guna memecahkan masalah.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat.

2. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis
   Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang Pajak Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal.
2. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dalam hal pengembangan Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pengalokasian Belanja Modal sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat mengoptimalkan Belanja Modal dengan baik.
3. Bagi Pihak Lain
   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi, bahkan sebagai referensi dan rujukan bagi pengembangan konsep tentang bagaimana pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

1.5.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi
   Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu akuntansi serta pengetahuan dan referensi tentang pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya
   Menjadi bahan referensi dan dasar pengembangan bagi penelitian selanjutnya tentang pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal.

I. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 KAJIAN PUSTAKA

2.1.1 Pajak Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pajak Daerah

Mariot Pahala Siahaan (2013:9) menyatakan pajak daerah adalah :

"iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung (kontraprestasi) yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

2.1.1.2 Sumber-sumber Pajak Daerah

Dalam Siahaan (2013:64) pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undag Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagaimana di bawah ini.

a. Jenis pajak provinsi terdiri atas :
   1. Pajak Kendaraan Bermotor
   2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
   3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
   4. Pajak Air Permukaan
   5. Pajak Rokok

b. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas :
   1. Pajak Hotel
   2. Pajak Restoran
   3. Pajak Hiburan
   4. Pajak Reklame
   5. Pajak Penerangan Jalan
   6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
   7. Pajak Parkir
   8. Pajak Air Tanah
   9. Pajak Sarang Burung Walet
   10. Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2.1.2 Dana Alokasi Khusus

2.1.2.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus

Menurut Ahmad Subekan (2012:88) pengertian dana alokasi khusus adalah :

"Dana alokasi khusus adalah salah satu mekanisme transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang".

2.1.2.2 Faktor-Faktor Dana Alokasi Khusus

APBD merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan pengalokasian belanja modal diantaranya dari sektor dana perimbangan salah satunya yaitu variabel dana alokasi khusus (Abdul Halim, 2007). APBD merupakan satu kesatuan (Darise, 2008) yang terdiri dari:

1. Pendapatan daerah
2. Belanja daerah
3. Pembiayaan daerah

2.1.3 Belanja Modal

2.1.3.1 Pengerian Belanja Modal

Erlina dan Rasdianto (2013:121) menyebutkan bahwa belanja modal adalah :

"Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset belanja modal yaitu sebesa harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan". melayani masyarakat".

2.1.3.2 Jenis-Jenis Belanja Modal

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:121) Belanja Modal meliputi :

1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Belanja Modal Fisik Lainnya

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari beberapa komponen PAD tersebut, salah satunya pajak daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Sianturi (2009) menyatakan bahwa semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula PAD. Sugianto (2011:28) menyebutkan bahwa hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah dan untuk belanja pemerintah.

2.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan salah satu transfer dari dana perimbangan (dana transfer dari pemerintah pusat) sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan indikasi bahwa belanja daerah termasuk belanja modal juga dipengaruhi sumber penerimaan ini. Darise (2008:137-138) DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan dan paradigma penelitian, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_I : Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

H_2 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal

III. METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:2) menyatakan bahwa metode penelitian adalah :

"Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2012:58) menyatakan bahwa operasionalisasi variabel adalah: segala yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Operasionalisasi variabel yang diperlukan untuk menentukkan variabel yang dapat dioperasionalisasikan atau diukur dengan menggunakan jenis, indikator, serta skala dari variabel yang terkait dalam penelitian.

Untuk itu variabel yang akan dikaji adalah pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal, dimana variabel-variabel yang terkait dalam peneilitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel Bebas *(Independent)*
   Menurut Sugiyono (2012:59) variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terkait). Variabel bebas *(Independent)* pada penelitian ini adalah Pajak Daerah (X_1) dan Dana Alokasi Khusus (X_2). Dalam operasionalisasinya semua variabel diukur oleh instrument pengukuran dalam bentuk rasio.
2. Variabel Terikat *(Dependent)*
   Menurut Sugiyono (2012:59) variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam hal ini variabel yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti adalah Belanja Modal (Y).

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Andi Supangat (2010:2) menyatakan bahwa sumber data sekunder adalah :

"Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi (keterangan) objek yang diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua baik dari objek secara individual (responden) maupun dari suatu badan (instansi) yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari para pengguna".

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, di mana data yang diperoleh penulis merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, artinya data-data tersebut berupa data kedua yang telah diolah lebih lanjut dan data yang disajikan oleh pihak lain. Data-data yang digunakan diperoleh dari laporan-laporan yang berhubungan dan sudah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang tidak langsung berhubungan langsung dengan objek penelitian tetapi sifatnya melengkapi, membantu, dan menambah informasi untuk bahan penelitian. Sumber data sekunder yang ada dalam penelitian ini di antaranya kajian literatur, dokumen-dokumen, laporan-laporan, jurnal, dan internet.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012:63) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Lapangan

   Jonathan Sawarno (2006:82) menjelaskan bahwa studi lapangan merupakan desain penelitian yang mengkombinasikan antara pencarian survei berdasarkan pengalaman dan atau studi kasus dimana peneliti berusaha mengidentifikasi variabel-variabel penting dan hubungan antar variabel tersebut dalam situasi permasalahan tertentu. Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang tersedia dari Jumlah Penerimaan Pajak Daerah tahunan , Jumlah Penerimaan Dana Alokasi Khusus tahunan dan Realisasi Laporan Pengeluaran Belanja Modal tahunan pada BPS Jawa Barat kurun waktu 4 tahun dengan periode tahun 2011-2014.
2. Studi Kepustakaan

   Jonathan Sarwono (2006:26) studi pustaka yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan orang lain. Tujuannya ialah untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Penelitian kepustakaan dilakukan sebagai usaha guna memperoleh data yang bersifat teori sebagai pembanding dengan data penelitian yang diperoleh. Penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku di perpustakaan, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti oleh penulis, seperti studi kepustakaan melalui jurnal, textbook, karya tulis yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4 Populasi, Sampel, dan Tempat serta Waktu Penelitian

Adapun teknik penentuan data terbagi menjadi dua bagian, yaitu populasi dan sampel.

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2012:115) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kemudian Sugiyono (2012:15) pula menjelaskan bahwa populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain.

Apabila dikaitkan dengan judul yang diambil penulis, yaitu Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal, maka yang menjadi populasi penelitian ini adalah laporan realisasi APBD Kabupaten dan Kota Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2014.

3.4.2 Penarikan Sampel

Dengan meneliti secara sampel, diharapkan hasil yang telah dipeorleh akan memberikan kesimpulan gambaran sesuai dengan karakteristik populasi.

Menurut Umi Narimawati (2010:38) menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih untuk menjadi unit pengamatan dalam penelitian.

Penentuan jumlah sampel yang akan diolah dari jumlah populasi harus dilakukan dengan teknik pengambilan sampling yang tepat. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik nonprobabilitas sampling.

Menurut Sugiyono (2011:84) pengertian nonprobabilitas sampling adalah sebagai berikut:

”Teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel”

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh karena penelitian ini mengambil semua anggota populasi Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat untuk dijadikan sampel. Sampel yang memenuhi kriteria tersebut yang terdiri dari 17 kabupaten di

Provinsi Jawa Barat dan 9 kota di Provinsi Jawa Barat, sehingga jumlahnya (17 ditambah 9 dikali 4 tahun = 104 sampel).

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk dapat memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis mengadakan penelitian yang dilakukan pada Badan Pusat Statistik di Jalan PH.H. Mustofa No.43, Cibeunying Kaler, Jawa Barat.

3.5 Metode Pengujian Data

Teknik pengujian data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, dimana uji asumsi klasik ini terdiri dari :

1. Uji Normalitas

Imam Gozali (2011:160) menyatakan bahwa uji normalitas adalah untuk menguji apakah metode regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki data normal.

Dengan dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas *(Asymtotic Significance)* menurut Singgih Santoso (2002:393) sebagai berikut :

a. Jika probabilitas >0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal;
b. Jika probabilitas <0,05 maka populasi tidak berdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolerasi merupakan suatu situasi dimana beberapa atau semua variabel bebas berkorelasi kuat (Gujarati, 2003:351). Jika terdapat korelasi yang kuat di antara sesama variabel independen maka konsekuensinya adalah:

a. Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir.
b. Nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tidak terhingga.

Dengan demikian berarti semakin besar korelasi diantara sesama variable independen, maka tingkat kesalahan dari koefisien regresi semakin besar yang mengakibatkan standar errornya semakin besar pula. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dengan menggunakan *Variance Inflation Factors (VIF)*,

$$VIF = \frac{1}{1 - R_{\mathrm{i}}{}^2}$$

Sumber: Husein Umar (2011:179)

Dimana Ri² adalah koefisien determinasi yang diperoleh dengan meregresikan salah satu variabel Xi terhadap variabel bebas lainnya. Jika nilai VIF nya kurang dari 10 maka dalam data tidak terdapat Multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain (Husein Umar, 2011:179).

Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji-rank Spearman yaitu dengan mengkorelasikan masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual. Jika nilai koefisien korelasi dari masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (error) ada yang signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (varian dari residual tidak homogen) (Gujarati, 2003:406).

4. Uji Autokorelasi

Menurut Husein Umar (2011:182) menyatakan bahwa uji autokorelasi adalah dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik

positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perhitungan nilain statistik Durbin-Watson. Kriteria uji: bandingkan nilai D-W dengan nilai d dari tabel Durbin-Watson:

a. Jika D-W < dL atau D-W > 4 – dL, kesimpulannya pada data terdapat autokorelasi.
b. Jika dU < D-W < 4 – dU, kesimpulannya pada data tidak terdapat autokorelasi.
c. Tidak ada kesimpulan jika dL ≤ D-W ≤dU atau 4 – dU ≤ D-W ≤ 4-dL.

Apabila hasil uji Durbin-Watson tidak dapat disimpulkan apakah terdapat autokorelasi atau tidak maka dilanjutkan dengan runs test.

3.6 Metode Pengujian Data

3.6.1 Metode Analisis

Menurut Umi Narimawati, dkk. (2010:41), metode analisis didefinisikan sebagai berikut:

> "Metode analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang telah diproses dari hasil observasi lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain".

Analisis data yang digunakan penulis yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif.

1. **Analisis Deskriptif (Kualitatif)**

   Menurut Sugiyono (2011: 14) menyatakan bahwa analisis deskriptif (kualitatif) adalah :

   "Metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama dilapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail".

2. **Analisis Verifikatif (Kuantitatif)**

   Menurut Sugiyono (2011:31) menyatakan bahwa analisis verifikatif (kuantitatif) adalah :

   "Dalam penelitian kuantitatif analisis data menggunakan statistik. Statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan inferensial/induktif. Statistik inferensial dapat berupa statistik parametris dan statistik non parametris. Peneliti menggunakan statistik inferensial bila penelitian dilakukan pada sampel yang dilakukan secara random. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat berupa tabel, tabel ditribusi frekuensi, grafik garis, grafik batang, piechart (diagram lingkaran), dan pictogram. Pembahasan hasil penelitian merupakan penjelasan yang mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan".

3.6.1.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Sugiyono (2011:277) menyatakan bahwa analisis regresi linier berganda adalah :

"Analisis regresi linier berganda adalah analisis yang digunakan peneliti, bila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya)".

Persamaan analisis regresi linier berganda secara umum untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Sumber : Sugiyono (2010:192)

Dimana:

Y : Belanja Modal

A : Konstanta merupakan nilai terikat yang dalam hal ini adalah Y pada saat variabel bebasnya adalah 0 (X1, X2 = 0).

β1 : Koefisien regresi berganda antara variabel bebas X1 terhadap variabel terikat Y, apabila variabel bebas X2 dianggap konstan.
β2 : Koefisien regresi berganda antara variabel bebas X2 terhadap variabel terikat Y, apabila variabel bebas X1 dianggap konstan.
X : Variabel independen, yang terdiri dari Pajak Daerah (X1), Dana Alokasi Khusus (X2) .

3.6.1.2 Analisis Kolerasi Pearson

Besarnya pengaruh masing-masing komponen variabel tidak terikat terhadap variabel terikat yaitu Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dapat diketahui dengan menggunakan korelasi pearson.
Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum x_1)(\sum Y)}{\sqrt{\{n(\sum x_1^2) - (\sum x_1)2\}\{n(\sum Y^2) - (\sum Y)2\}}}$$

Dimana : r = Koefisien korelasi

Hasil Perhitungan akan memberikan tiga alternatif, yaitu:

a. Apabila nilai r mendekati positif (+) satu variabel berarti variabel X mempunyai hubungan yang kuat dengan positif terhadap variabel Y.
b. Apabila nilai r mendekati negatif (-) berarti variabel X mempunyai pengaruh yang kuat dan negatif terhadap perkembangan variabel Y.
c. Apabila nilai r mendekati nol (0) maka variabel X kurang mempengaruhi terhadap perkembangan variabel Y, hal ini berarti bahwa bertambahnya atau berkurangnya variabel Y tidak mempengaruhi variabel X.

Untuk dapat memberikan penjelasan besar kecilnya koefesien korelasi, dapat dilihat pada ketentuan tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Tingkat Keeratan Korelasi

Intrerval Koefisien	Tingkat Hubungan
0-0,20	Sangat rendah (Hampir tidak ada hubungan)
0,21 – 0,40	Korelasi yang lemah
0,41 – 0,60	Korelasi sedang
0,61 – 0,80	Cukup tinggi
0,81 – 1	Korelasi tinggi

Sumber : Syahri Alhusin (2003:157)

3.6.1.3 Koefisien Determinasi

Besarnya pengaruh Pajak Daerah (X1) dan Dana Alokasi Khusus (X2) terhadap Belanja Modal (Y) dapat diketahui dengan menggunakan analisis koefisien determinasi atau disingkat Kd yang diperoleh dengan mengkuadratkan koefisien korelasinya yaitu:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Sumber: Umi Narimawati(2010:50)

Keterangan:
Kd : Koefisien Determinasi atau Seberapa Jauh Perubahan Variabel Dipergunakan oleh Variabel X
R^2 : Kuadrat Koefisien Korelasi
100% : Pengkali yang menyatakan dalam persentase
Dengan diketahuinya koefisien korelasi antara masing-masing Pajak Daerah (X1) dan Dana Alokasi Khusus (X2) serta Belanja Modal (Y), kita bisa menentukan koefisien determinasi.

3.6.2 Pengujian Hipotesis

Sugiyono (2011:159) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Adapun pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian adalah pegujian secara parsial (uji t) dan penyajian secara simultan (uj F).

a. Uji Parsial (t-test)

Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t(*t-test*) digunakan untuk menguji hipotesis sacara parsial guna menunjukan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabeldependen

Dalam hal ini, variabel independennya yaitu pajak daerah dan dana alokasi khusus. Sedangkan variabel dependennya yaitu belanja modal. Langkah-langkah pengujian hipotesis secara parsial adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh antara variabel X (variabel bebas) dan variabel Y (variabel terikat). Dimana hipotesis nol (H_0) yaitu hipotesis tentang tidak adanya pengaruh. Sedangkan hipotesis alternatif (H_1) merupakan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini. Masing-masing hipotesis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

H_0 : $\beta_1 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

H_1 : $\beta_1 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

2. Menghitung Uji t (t-test)

Menurut Sugiyono (2012: 250), mencari :

$$T_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-k-2}}{1-r^2}$$

Keterangan:

r : Korelasi parsial

k : jumlah variabel independen

n : Jumlah sampel

3. Kriteria Pengambilan Keputusan

a. H0 ditolak jika p-value < 0,05 dan thitung > ttabel

b. H0 diterima jika p-value > 0,05 dan thitung < ttabel

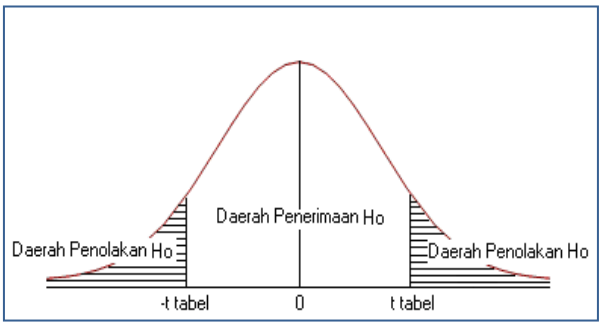
3.6.3 Penetapan Tingkat Signifikan

Menurut Nazir (2005:394), Tingkat signifikan (significant level) yang sering digunakan adalah sebesar 5% atau 0,05 karena dinilai cukup ketat dalam menguji hubungan variabel-variabel yang diuji atau menunjukan bahwa korelasi antara kedua variabel cukup nyata. Disamping itu tingkat signifikansi ini umum digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Tingkat signifikansi 0,05 artinya adalah kemungkinan besar dari hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% atau toleransi kesalahan sebesar 5%.

3.6.4 Uji Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

Untuk menggambar daerah penerimaan atau penolakan ditentukan daerah penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan thitung dengan ttabel dengan ketentuan:

- Jika thitung < ttabel atau thitung > ttabel maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen, maka H0 diterima (tidak signifikan)
- Jika –t tabel ≤ thitung ≤ ttabel, variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, maka H0 diterima (tidak signifikan).



Sumber : Sugiyono (2011:185)

Gambar 3.1
Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

3.6.5 Penarikan Kesimpulan

Daerah yang diarsir merupakan daerah penolakan dan berlaku sebaliknya. Jika t hitung jatuh di daerah penolakan (penerimaan) maka Ho ditolak (diterima) dan Ha diterima (ditolak). Artinya koefisien regresi signifikan (tidak signifikan). Kesimpulannya, Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus mempengaruhi (tidak mempengaruhi) Belanja Modal. Tingkat signifikannya yaitu 5% (α = 0,05) artinya jika hipotesis nol ditolak (diterima) dengan taraf kepercayaan 95% maka kemungkinan bahwa hasil dari penarikan kesimpulan mempunyai kebenaran 95% dan hal ini menunjukkan adanya (tidak adanya pengaruh yang meyakinkan (signifikan) antara dua variabel tersebut). Dalam hal ini ditunjukkan dengan penolakan Ho atau penerimaan alternatif (Ha).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 17 kabupaten dan 9 kota pada tahun 2011- 2014 dengan menggunakan Laporan Realisasi APBD. Sebelum membahas bagaimana pengaruh anatar variabel, terlebih dahulu akan dibahas gambaran keadaan tiap variabel yaitu Pajak Daerah (X), Dana Alokasi Khusus (X) dan Belanja Modal (Y) pada tahun 2011-2014, maka terlebih dahulu dilakukan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif yang akan digunakan meliputi nilai minimum, maksimum serta nilai rata-rata.

4.1.1.1 Analisis Deskriptif Pajak Daerah

Perkembangan pajak daerah pada beberapa Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011-2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Rata-rata pajak daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat tahun 2011-2014 adalah sebesar Rp. 204.958.452,89 dengan pajak daerah tertinggi mencapai angka Rp. 1.400.000.000,00 dimiliki oleh Kota Bandung pada tahun 2014, sedangkan pajak daerah terendah sebesar Rp. 3.374.558,00 dimiliki oleh Kota Banjar tahun 2011.

4.1.1.2 Analisis Deskriptif Dana Alokasi Khusus

Perkembangan dana alokasi khusus pada beberapa Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011-2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Rata-rata dana alokasi khusus sebesar Rp. 79.413.040,55 dengan dana alokasi khusus tertinggi mencapai angka Rp. 303.843.333,00 dimiliki oleh Kabupaten Sumedang pada tahun 2014, sedangkan dana alokasi khusus terendah sebesar Rp. 1.967.400,00 dimiliki oleh Kota Cimahi tahun 2011.

4.1.1.3 Analisis Deskriptif Belanja Modal

Perkembangan belanja modal pada beberapa Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011-2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Rata-rata belanja modal sebesar Rp.382.853.609,00 dengan belanja modal tertinggi mencapai angka Rp. 1.393.850.108,00 dimiliki oleh Kota Bandung pada tahun 2014, sedangkan belanja modal terendah sebesar Rp. 21.920.947,00 dimiliki oleh Kota Sukabumi tahun 2012.

4.1.2 Hasil Analisis Verifikatif

4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik

Langkah awal dalam analisis regresi adalah pengujian asumsi klasik. Pengujian ini mutlak diperlukan sebelum pengujian regresi linear berganda dilakukan. Pengujian asumsi klasik meliputi, pemeriksaan terhadap asumsi normalitas residual, multikolinearitas pada variabel bebas, heteroskedastisitas dan autokorelasi pada data *time series*.

a. Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel pengganggu atau residu (e) memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya memiliki residual yang berdistribusi secara normal. Pada grafik probability plots, dapat dilihat bahwa titik-titik atau data residu menyebar disekitar garis dan mengikuti arah garis diagonal, hasil tersebut menunjukan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi normal.

Untuk memperkuat hasil pengujian secara visual yang tersaji pada gambar grafik probability plot, dapat digunakan uji kolmogorov-smirnov. Jika nilai signifikansi yang diperoleh jauh lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa residu dalam model berdistribusi secara normal. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan uji normalitas data, diketahui bahwa residu dalam model regresi yang akan dibentuk berdistribusi secara normal dikarenakan hasil pengujian menunjukan nilai signifikansi sebesar 0,882 yang lebih besar dari 0,05.

b. Uji Multikolineritas

Multikolinearitas merupakan suatu kondisi adanya hubungan yang sangat kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas yang dilibatkan dalam model regresi. Masalah multikolinearitas dapat dideteksi dari nilai tolerance serta lawannya variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance yang diperoleh lebih besar dari 0,10 dan VIF kurang dari 10, dapat disimpulkan bahwa model telah terbebas dari masalah multikolinearitas. Berdasarkan hasil yang tersaji pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari multikolinearitas, dikarenakan kedua variabel bebas memiliki nilai tolerance yang lebih besar dari 0,10 serta nilai VIF kurang dari 10, sehingga asumsi untuk terbebas dari msalah multikolineritas telah terpenuhi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji homogenitas varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan nilai residualnya (SRESID). Dasar pengambilan keputusan ada atau tidaknya heteroskedisitas adalah:

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian meyempit), hal tersebut mengindikasikan adanya heteroskedisitas.
2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang ada menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, hal tersebut mengindikasikan model terbebas dari masalah heteroskedisitas.

Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan glejser test, diketahui bahwa model regresi yang akan dibentuk telah terbebas dari gejala heteroskedastisitas dikarenakan nilai signifikansi hasil regresi antara kedua variabel bebas dengan nilai Abs. Res jauh lebih besar dari 0,05, sehingga model telah memenuhi asumsi untuk dilakukan pengujian regresi.

d. Uji Autokorelasi

Nilai dU yang digunakan sebagai nilai kritis dalam pengujian ini diperoleh dari tabel Durbin Watson dengan jumlah data observasi 104 dan 2 variabel bebas. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa nilai Durbin Watson yang diperoleh berada diantara nilai dU dan 4-dU. Hasil tersebut menunjukan jika model regresi terbebas dari masalah autokorelasi, sehingga model memenuhi salah satu asumsi untuk dilakukan pengujian regresi.

4.1.2.2 Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi yang menjelaskan pengaruh pajak daerah dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal adalah sebagai berikut:

$$Y = 0{,}101 + 0{,}968\ X_1 + 1{,}079\ X_2$$

4.1.2.3 Koefisien Korelasi

a. Koefisien antara Pajak Daerah dengan Belanja Modal

Koefisien korelasi yang diperoleh adalah sebesar 0,902 dan termasuk dalam kategori hubungan yang sangat kuat dikarenakan berada pada interval korelasi antara 0,80-1,000. Koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukan hubungan yang terjadi adalah searah, dimana semakin tinggi pajak daerah, akan diikuti oleh semakin meningkatnya belanja modal.

b. Koefisien antara Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal

Koefisien korelasi yang diperoleh adalah sebesar 0,227 termasuk dalam kategori hubungan yang lemah dikarenakan ada pada interval korelasi antara 0,20-0,399. Koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukan hubugan yang terjadi adalah searah, dimana semakin besar dana alokasi khusus, akan diikuti oleh semakin tingginya belanja modal.

4.1.2.4 Pengujian Hipotesis

a. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Nilai t_{hitung} sebesar 23,763 berada didaerah penolakan Ho, maka dengan tingkat kepercayaan 95% diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha. Hasil tersebut menunjukan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.

b. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Nilai t_{hitung} sebesar 5,451 ada didaerah penolakan Ho, maka dengan tingkat kepercayaan 95% diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha. Hasil tersebut menunjukan bahwa dana alokasi khusus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.

4.1.2.5 Koefisien Determinasi

Pajak daerah memberikan kontribusi pengaruh sebesar 80,9% terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, sedangkan dana alokasi khusus memberikan kontribusi pengaruh sebesar 4,7%, sehingga total pengaruh yang diberikan keduanya adalah sebesar 85,6%.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Dari hasil pengujian statistik ditunjukkan bahwa pengaruh langsung variabel Pajak Daerah (X_1) terhadap variabel Belanja Modal (Y), dilihat koefisien korelasi yang diperoleh adalah sebesar 0,902 dan termasuk dalam kategori hubungan yang kuat dikarenakan ada pada interval korelasi antara 0,80-1,000. Koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa semakin tingginya pajak daerah, akan diikuti oleh semakin meningkatnya belanja modal.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang dikemukakan Sugianto (2011:28) menyebutkan bahwa hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah dan untuk belanja pemerintah salah satunya belanja modal.

Pengaruh positif Pajak Daerah terhadap Belanja Modal ini menjawab fenomena yang telah dikemukaan sebelumnya oleh Purwanti (2014) bahwa kenaikan pajak daerah memberikan dampak kenaikan pada PAD namun pembangunan fisik yang harus dibiaya masih belum terealisasi oleh pemerintah.

Hasil dari penelitian yang menunjukan pengaruh positif ini juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Diah Susilowati (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Kemudian, R.Budi Hendaris dan Handiyaningrum Tjatur Rahayu (2012) juga menebutkan dalam penelitiannya bahwa apabila pajak daerah mengalami kenaikan maka alokasi belanja modal akan mengalami kenaikan pula.

4.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dari hasil pengujian statistik ditunjukkan bahwa pengaruh langsung variabel Dana Alokasi Khusus (X_2) terhadap variabel Belanja Modal (Y), dilihat koefisien korelasi yang diperoleh adalah sebesar 0,227 termasuk dalam kategori hubungan yang kuat dikarenakan ada pada interval korelasi antara 0,20-0,399. Koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa semakin tingginya dana alokasi khusus, akan diikuti oleh semakin meningkatnya belanja modal.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang dikemukakan Darise (2008:137-138) DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Pengaruh positif Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal ini menjawab fenomena yang telah dikemukaan sebelumnya oleh Djoko Kirmanto (2013) yang menyampaikan bahwa kondisi infrastruktur daerah yang relatif tetap rendah, meskipun dana alokasi khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk daerah dari tahun ke tahun kian bertambah, hal ini disebabkan karena tidak adanya monitoring khusus yang bisa dilakukan pemerintah pusat sehingga anggaran yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi meleset tidak tepat sasaran.

Hasil dari penelitian yang menunjukan pengaruh positif ini juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sheila Ardian Nuarisa (2012) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa variabel dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan memiliki arah koefisien yang sama dengan hipotesis awalnya, yaitu positif. Kemudian sejalan dengan Sheila Ardian Nuarisa (2012), Dian Novitasari (2015) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja modal, hal ini karena dana alokasi khusus (DAK) merupakan dana alokasi yang diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional, sehingga semakin tinggi dana alokasi khusus maka alokasi belanja modal akan ikut meningkat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Artinya semakin tinggi pajak daerah yang diterima maka semakin tinggi juga belanja modal yang diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pajak daerah merupakan salah satu faktor kuat yang mempengaruhi belanja modal, hal ini terlihat dari hasil pengujian statistik yang telah dilakukan. Pajak daerah memiliki pengaruh nilai presentasi tinggi terhadap belanja modal.
2. Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Artinya semakin tinggi dana alokasi khusus yang diterima maka semakin tinggi juga belanja modal yang diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi belanja modal, hal ini terlihat dari hasil pengujian statistik yang telah dilakukan. Meskipun dana alokasi khusus berpengaruh dengan nilai prsentasi yang rendah terhadap belanja modal namun dana alokasi khusus merupakan salah satu faktor meningkatnya belanja modal.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

1. Untuk meningkatkan pajak daerah pemerintah daerah perlu lebih menekankan penarikan biaya dari sumber-sumber pajak daerah seperti PAD, pajak rokok, pajak bea cukai, pajak gedung dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklama serta pajak lainnya.
   Bila orang pribadi atau badan tersebut tidak membayar pajak daerah tepat pada waktunya maka pemerintah daerah dapat memberikan sanksi kepada orang pribadi atau badan tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar pendapatan pajak daerah lebih meningkat lagi setiap tahunnya.
2. Kemudian untuk meningkatkan dana alokasi khusus harus mengedepankan kepada kabupaten/kota yang masih membutuhkan dana khusus sesuai dengan kebutuhan kabupaten/kota tersebut.
   Agar mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah kabupaten/kota dan pelayanan antar bidang di kabupaten/kota tersebut serta untuk meningkatkan infrastruktur tiap daerah kabupaten/kota menjadi lebih baik lagi.
3. Serta untuk meningkatkan belanja modal perlu dilakukan pemberian anggaran yang tepat sasaran kepada anggaran belanja modal, tidak meleset dari anggaran yang lainnya seperti belanja pegawai ataupun belanja daerah agar pengadaan atau pembelian aset tersebut dapat bermanfaat bagi kegiatan pemerintah secara ekonomis, sosial, dan manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat.

5.2.2 Saran Akademis

1. Bagi peneliti selanjutnya variabel bebas yang digunakan hendaknya tidak hanya pajak daerah dan dana alokasi khusus saja terutama untuk dana alokasi khusus dari hasil penelitian yang dilakukan pengaruh dari dana alokasi khusus terhadap belanja modal masih sangat kecil. Hal karena masih banyak faktor yang dapat mempengaruhi belanja modal seperti retribusi daerah, dana alokasi umum, dana perimbangan, dan lain-lain.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan kedepannya bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Supangat.2010. Statistika: *Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik*. Jakarta: Kencana.

Arikunto, Suharsimi (2006) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Bastian, Indra. 2006*. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia.* Jakarta:Salemba Empat.

Darise, Nurlan. (2008) *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik).* Indeks, Jakarta.

Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. *"Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal"*. Simposium Nasional Akuntansi 10 Makasar.

Erlina dan Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Brama Ardian. Medan.

Felix, Olurankinse. 2012. Analysis Of The Effectiveness Of Capital Expenditure Budgeting In The Local Government System Of Ondo State. *Journal of Accounting and Taxation*. 4(1): pp:1-6.

Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometri Dasar*. Terjemahan : Sumarno Zain. Jakarta: Erlangga.

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul dan Muhammad Syam. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat.

Harianto, David dan Prio Hari Adi. 2007 Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita, *Simposium Nasional Akuntansi X*, 26-28 Juli. Makassar.

Hendaris Budi R dan Rahayu Tjatur Handiyaningrum. 2012. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal.*

Husein Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta : Raja Grafindo Persada*.

Imam Gozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19* (edisi kelima). Semarang: Universitas Diponogoro.

I Putu Bagus Indra Mulia Nugraha dan A.A.N.B Dwirandra. 2016. *Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DBH Pada Belanja Modal.* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN: 2303-1018 Vol.14.

Jonathan Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jones, Stewart and Walker, R.G. 1983. Explanators of Local Government Distress. *International Journal of Public Administration*. 43(3): pp:396- 418.

Kawendar, Warsito dkk. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Kompas.com. 2013. Dana Alokasi Khusus Terus Bertambah Infrastruktur Daerah Tetap Rendah. 24 September 2013 19:20 WIB.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* . Penerbit Andi, Yogyakarta.

Mohammad. Nazir, (2007) *Metode Penelitian.* Jakarta : Ghalia Indonesia.

Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pelealu Anderas Marzel Pelealu. 2013. *Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Buleleng tahun 2006-2012.* Jurnal EMBA Vol.1 No.4. ISSN 2303-1174.

Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sari Novita Dian. 2015. *Pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal*. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol.11 Edisis Khusus.

Sheila Ardhina Nuarisa. 2013. *Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Accounting Analysis Journal ISSN 2252-6765.

Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah edisi revisi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sianturi. Agave. 2010. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatra Utara*. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara.

Singgih Santoso. 2002. *SPSS Versi 11.5 Cetakan Kedua*. Jakarta : Gramedia

Subekan, Achmat. 2012. *Keuangan Daerah : Terapi Atasi Kemiskinan.* Dioma, Malang.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta. Bandung.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan* : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-14.

Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik untuk keuangan dan pembangunan daerah. Yogyakarta: ANDI

Susilowati Diah. 2012. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal.*

Umi Narimawati dkk. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Genesis

Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi.* Bandung: Agung Media.

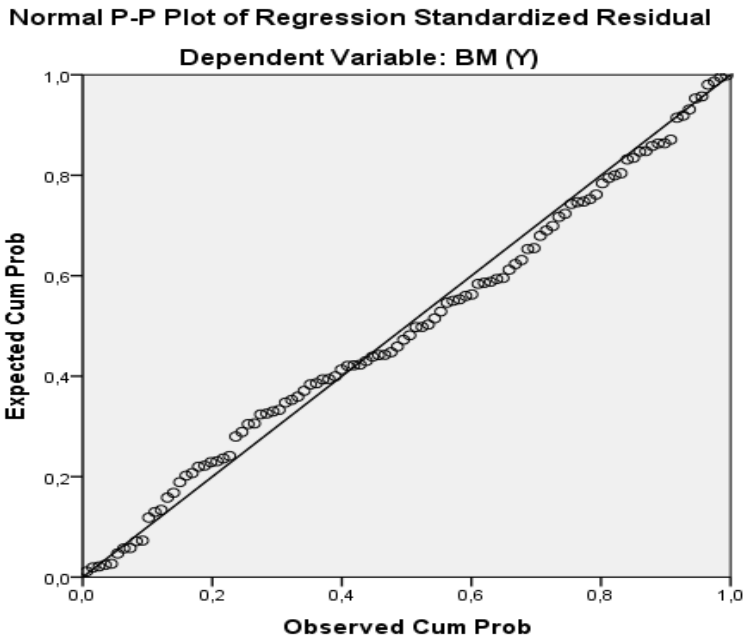
Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta.

LAMPIRAN

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Pajak Daerah (X1)	Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung (kontraprestasi) yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Mariot Pahala Siahaan (2013:9)	Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Kota) (Sianturi, 2009)	Rasio
Dana Aloksi Khusus (X2)	Dana Alokasi Khusus adalah dana salah satu mekanisme transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik derah sesuai prioritas nasional serta mengurang kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antarbidang. Ahmad Subekan (2012:88)	APBD Halim (2007)	Rasio
Belanja Modal (Y)	Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Halim dan Kusufi (2012:107)	Belanja Modal (Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigsi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya) Erlina dan Rasdianto (2013:121)	Rasio

Uji Normalitas



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		104
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,11499738
Most Extreme Differences	Absolute	,057
	Positive	,057
	Negative	-,053
Kolmogorov-Smirnov Z		,586
Asymp. Sig. (2-tailed)		,882

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

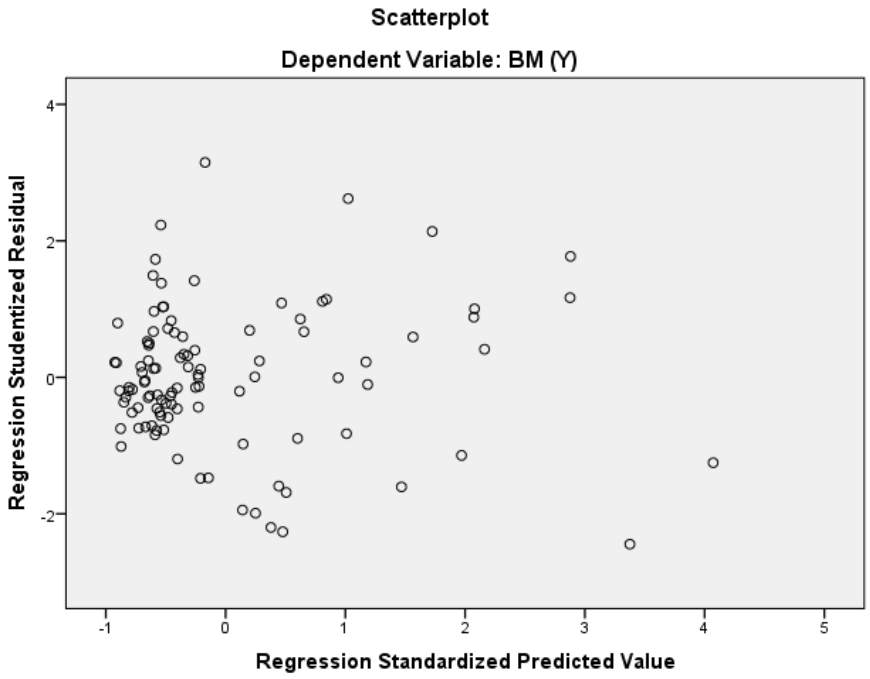
Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PD (X1)	,999	1,001
	DAK (X2)	,999	1,001

a. Dependent Variable: BM (Y)

Uji Heteroskedastisitas



Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,925[a]	,856	,853	,11613	1,772

a. Predictors: (Constant), DAK (X2), PD (X1)

b. Dependent Variable: BM (Y)

Regresi Linier Berganda dan Uji t (Parsial)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations
		B	Std. Error	Beta			Zero-order
1	(Constant)	,101	,021		4,905	,000	
	PD (X1)	,968	,041	,897	23,763	,000	,902
	DAK (X2)	1,079	,198	,206	5,451	,000	,227

a. Dependent Variable: BM (Y)

Koefisien Korelasi

Correlations

		PD (X1)	DAK (X2)	BM (Y)
PD (X1)	Pearson Correlation	1	,023	,902**
	Sig. (2-tailed)		,815	,000
	N	104	104	104
DAK (X2)	Pearson Correlation	,023	1	,227*
	Sig. (2-tailed)	,815		,021
	N	104	104	104
BM (Y)	Pearson Correlation	,902**	,227*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,021	
	N	104	104	104

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,925[a]	,856	,853	,11613

a. Predictors: (Constant), DAK (X2), PD (X1)

b. Dependent Variable: BM (Y)